

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya telah membantu dalam memberikan gambaran dan penjelasan kerangka diskusi. Dan juga memberikan gambaran untuk perbandingan sekaligus tolak ukur. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis memasukkan temuan penelitian sebelumnya yang berharga mengenai pengaruh analisis peran komite sekolah dan keterbukaan publik, *Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Pemanfaatan Dana Bos Dimediasi Implementasi Kebijakan Studi Pada Dinas Pendidikan Kota Lamongan( Metode Structural Equation Modeling (SEM) - Partial Least Square (PLS))*”

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Paribrata, Zulaikha (2018) menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur berpengaruh positif terhadap manajemen kesejahteraan masyarakatnya.

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Amarin, dkk (2016). Hasil penelitian terdapat pengaruh positif Peran Komite Sekolah Dalam Manajemen Berbasis Sekolah Di SD Islam Terpadu Buah Hati Kabupaten Pemalang

Hasil penelitian terdahulu oleh Mujati, Yuniep dkk (2018).

menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara mekanisme *good corporate governance* dan profitabilitas terhadap manajemen laba

Penelitian terdahulu juga dilakukan oleh Asitalia, Fioren dkk (2017). hasil menunjukkan bahwa pengaruh positif antara *good corporate governance* dan leverage terhadap manajemen laba.

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Hadiachandra, Aditya (2021). hasil dari penelitian ini adalah terdapat Pengaruh Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah terhadap Efektivitas Kerja Bendahara di Kota Tasikmalaya

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Susanti, Ira (2018). hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat Pengaruh antara Implementasi Kebijakan Akreditasi Puskesmas terhadap Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam Mewujudkan Produktivitas Kerja

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh rustan, kurnia (2021). hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem manajemen pemanfaatan dana sangat berpengaruh terhadap Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Russo,Sofany dkk (2021). hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *E-Government* dalam mendukung transparansi dan keterbukaan informasi publik berpengaruh positif

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Nur, Lutfhi (2017). hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat Pengaruh antara Pelaksanaan

## Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Savira, Amanda (2019) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi prinsip keterbukaan informasi publik terkait pembukaan rahasia bank dalam manajemen risiko bagi bank umum mempunyai pengaruh yang positif.

Berikut penelitian terdahulu yang digunakan untuk bahan rujukan penyusunan tesis :

1. Paribrata, Zulaikha (2018) Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Jawa Timur yang membahas Implementasi kebijakan(X1) dan Keterbukaan informasi publik (Y1). Persamaan penelitian yaitu pada implementasi kebijakan (X1) dan Keterbukaan informasi publik (Y1). Sedangkan perbedaannya terletak pada peran komite sekolah (X1), GCG (X3), Sistem manajemen pemanfaatan dana (Y).
2. Amarin dkk (2016). Peran Komite Sekolah Dalam Manajemen Berbasis Sekolah Di Sd Islam Terpadu Buah Hati Kabupaten Pematang. peran komite sekolah (X1) dan manajemen sekolah (Y1). Perbedaan terletak pada GCG (X), implementasi kebijakan(X) dan keterbukaan informasi publik(X).
3. Mujati, Yuniep dkk (2018). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba. Perbedaan

terletak pada implementasi kebijakan(X) dan keterbukaan informasi publik(X) serta peran komite sekolah (X)

4. Asitalia ,Fioren dkk (2017). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba. GCG(X1) dan Manajemen laba (Y).
5. Hadiachandra , Aditya (2021). Pengaruh Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah terhadap Efektivitas Kerja Bendahara di Kota Tasikmalaya. implement kebijakan (X), sistem informasi manajemen (Y).
6. Susanti, Ira (2018). Pengaruh Implementasi Kebijakan Akreditasi Puskesmas terhadap Manajemen Pelayanan Kesehatan Masyarakat dalam Mewujudkan Produktivitas Kerja. Implementasi kebijakan (X), system Manajemen (Y).
7. Rustan, Kurnia (2021). Sistem Manajemen Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos). Sistem manajemen pemanfaatan dana (X1).
8. Nur, Lutfhi (2017). Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. kebijakan (X1), manajemen keuangan desa (Y).
9. Russo, Sofany (2021). Penerapan E-Government Dalam Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Kasus Website Resmi Pemerintah Kota Manado). Keterbukaan informasi publik(X).

10. Savira, Amanda (2019). Implementasi Prinsip Keterbukaan Informasi Publik Terkait Pembukaan Rahasia Bank Dalam Manajemen Risiko Bagi Bank Umum. Implementasi kebijakan(X1).

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Sistem Manajemen Pemanfaatan Dana**

Menurut Mustafa (2017:3) Manajemen keuangan menjelaskan beberapa keputusan yang perlu diambil, yaitu keputusan investasi, keputusan pendanaan atau keputusan untuk memenuhi kebutuhan keuangan, dan keputusan kebijakan dividen.

Menurut Sartono (2011: 50), istilah pengelolaan keuangan dapat dipahami sebagai pengelolaan dana yang baik yang melibatkan pengalokasian modal secara efisien dalam berbagai bentuk investasi serta upaya untuk menghimpun modal untuk membiayai investasi atau pengeluaran yang efisien. . Orang yang melakukan pengelolaan keuangan adalah chief financial officer. Walaupun fungsi CFO di setiap organisasi belum tentu sama, namun pada prinsipnya fungsi utama CFO adalah merencanakan, meneliti, dan menggunakan berbagai cara untuk memaksimalkan efisiensi kegiatan perusahaan.

Menurut Astuty (2019: 1) penggunaan modal adalah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, pengetahuan tentang struktur kekayaan, keuangan dan modal dapat diperoleh melalui latihan. Selain itu, untuk mencapai hal tersebut, manajer harus berpegang pada prinsip

Pemanfaatan dana merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Dalam penyelenggaraan pendidikan, keuangan dan pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan bagian yang tak terpisahkan dalam kajian pengelolaan pendidikan. Komponen keuangan adalah komponen produksi yang menentukan terlaksananya proses belajar mengajar di sekolah/ madrasah bersama dengan komponen lain (Mulyasa, 2011:47).

### **2.2.2 Implementasi Kebijakan**

Secara etimologis konsep implementasi Kamus Webster dikutip oleh Solichin, Abdul Wahab (2004:64) adalah “providing mean to achieve (menyediakan sarana untuk mencapai sesuatu); dan memberikan dampak praktis kepada (memiliki dampak pada)”.

Menurut Joko, Widodo (2010:88) diakhiri dengan pemahaman bahwa implementasi adalah suatu proses yang melibatkan berbagai sumber daya, termasuk kemampuan manusia, keuangan dan organisasi, yang dilakukan oleh pemerintah dan sektor swasta (individu atau kelompok). Proses ini dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh para pengambil keputusan politik.

### **2.2.3 Peran Komite Sekolah**

Menurut Sagala (2011: 245) komite sekolah merupakan badan mandiri yang mewadai peran serta masyarakat dalam manajemen sekolah untuk meningkatkan mutu, pemerataan efisiensi pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan baik dalam sekolah maupun luar sekolah.

Engkoswara dkk (2011: 297) komite sekolah merupakan lembaga atau badan khusus yang dibentuk berdasarkan musyawarah demokratis

oleh para *Stalkholder* pendidikan ditingkat sekolah sebagai representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap mutu pendidikan di sekolah.

Dari beberapa pendapat di atas komite sekolah bisa diartikan sebuah badan yang dibentuk oleh sejumlah pelaku pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan baik di dalam sekolah maupun luar sekolah.

#### **2.2.4 Keterbukaan Informasi Publik**

Menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sendiri, informasi publik mengandung pengertian bahwa informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan/atau otoritas publik lainnya sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Sementara Assegaf dkk (2005:22) menjelaskan bahwa suatu informasi dikatakan sebagai informasi publik yaitu apabila informasi yang dikelola oleh negara selain informasi mengenai pribadi seseorang atau badan hukum privat bukanlah milik negara, namun milik masyarakat. Mencermati definisi tersebut, maka dapat dikatakan bahwa media massa merupakan bagian dari kegiatan penyelenggaraan negara. Melalui informasi publik, pemerintah dapat memberikan pemahaman dan menyampaikan informasi yang relevan dengan pemerintahan, seperti suatu keputusan atau kebijakan publik, kepada masyarakat.

#### **2.2.5 Penerapan *Good Corporate Governance***

Cadbury dalam Lukviarman, Niki (2016:17) Corporate Governance merupakan tata kelola perusahaan yang memiliki fokus pada keseimbangan antara tujuan ekonomi dan sosial antara tujuan pribadi dan kelompok. Tugas utama perusahaan publik adalah mencapai efisiensi penggunaan sumber daya dan menyamakan penggunaan dengan tanggung jawab dalam penggunaan sumber daya tersebut.

Corporate Governance menurut Effendi, Muh Arief (2016: 56) Corporate Governance didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui mengamankan aset perusahaan dan meningkatkan nilai pemegang saham jangka panjang. Dengan kata lain, tata kelola perusahaan mengacu pada metode dimana suatu organisasi diatur, dikelola, diarahkan atau dikendalikan dan mencapai tujuannya.

#### **2.2.6 Hubungan Antara Peran Komite Sekolah, Keterbukaan Informasi Publik Dan Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Sistem Manajemen Pemanfaatan Dana BOS Dimediasi Implementasi Kebijakan**

Dalam sebuah peraturan manajemen terdapat banyak hal yang mempengaruhi keberlangsungan sistem manajemen yang dipakai. Pemanfaatan dana BOS juga perlu adanya beberapa faktor yakni faktor dalam seperti komite sekolah.

para pelaku sekolah sangatlah penting dalam hal pemanfaatan dana ini, komite sekolah ikut andil dalam penyauran dana BOS. Disamping itu

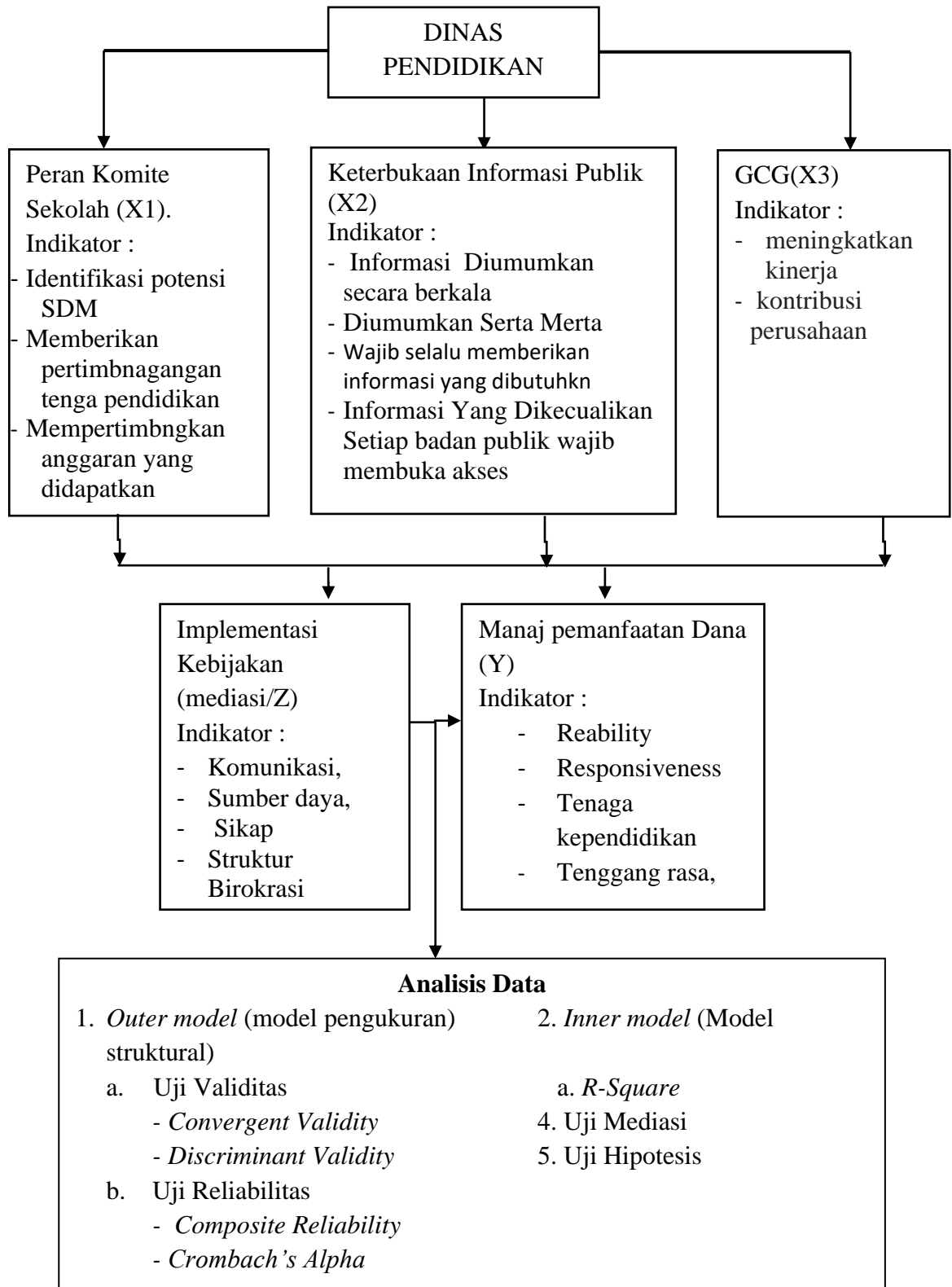


keterbukaan informasi seputar dana BOS juga diperlukan agar tidak terjadinya penyelewengan dana yang telah tersalurkan, selain dua hal tersebut ada satu faktor yang paling penting yakni penerapan *Good Corporate Governance*

*Good Corporate Governance* merupakan prinsip yang dibuat sebagai sistem pengendali internal dengan tujuan agar semua perencanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

### **2.3 Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual (Adom et al., 2018) merupakan kerangka konseptual yang menjadi acuan dasar peneliti dalam merancang suatu proses penelitian, mulai dari tahap perencanaan hingga menemukan hasil berupa tujuan penelitian.



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

## 2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu dugaan sementara mengenai rumusan suatu masalah penelitian, yang mana rumusan tersebut diubah menjadi suatu pertanyaan (Sugiyono, 2015:96)

Berdasarkan konteks dan pemaparan masalah yang diuraikan di atas, maka dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga peran komite sekolah berpengaruh positif secara signifikan terhadap sistem manajemen pemanfaatan dana BOS
2. Diduga keterbukaan informasi publik berpengaruh positif secara signifikan terhadap sistem manajemen pemanfaatan dana BOS
3. Diduga penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh positif secara signifikan terhadap sistem manajemen pemanfaatan dana BOS
4. Diduga peran komite sekolah berpengaruh positif secara signifikan terhadap Implementasi Kebijakan
5. Diduga keterbukaan informasi publik berpengaruh positif secara signifikan terhadap Implementasi Kebijakan
6. Diduga *Good Corporate Governance* berpengaruh positif secara signifikan terhadap Implementasi Kebijakan
7. Diduga Implementasi Kebijakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap sistem manajemen pemanfaatan dana BOS